

## DAFTAR PUSTAKA

- Article 19. 2015. *'Hate Speech' Explained Toolkit*. London.
- Austin, John Langshaw. 1962. *How to Do Things With Words*. Oxford: Oxford University Press.
- Asmayanti, Astri. 2019. *Linguistik Forensik: Linguis sebagai Saksi Ahli di Persidangan*. Seminar Internasional Kebahasaan 2019, 629-636: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Claudia,, Vinsca Sabrina dan Bagus J. Wibowo. 2021. *Ujaran Kebencian Warganet pada Akun Instagram BWF (Badminton World Federation): Analisis Linguistik Forensik*. Jurnal Translation and Linguistics (Transling) Vol. 1 No. 1.
- Coulthard, M. and Johnson, A. 2007. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evedence*. London: Routledge.
- D. J. Ningrum, S. Suryadi, dan D. E. Chandra Wardhana, *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*. J. Ilm. KORPUS, vol. 2, no.3, pp. 241–252, 2019, doi: 10.33369/jik.v2i3.6779.
- Daniels, Jessie. 2008. *Race, Civil Rights, and Hate Speech in the Digital Era*. Jurnal CUNY Academi Works. 1(4): 129-154.
- Djajasudarma, F. 2012. *Wacana dan Pragmatik*. Rafika Aditama.
- Fasold, Ralph. 2006. *An Introduction to Language and Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Handayani, Nanik. 2017. *Penggunaan Ujaran Kebencian pada Acara Indonesia Lawyers Club di Tv One: Kajian Pragmatik*. Tesis. PPs Unhas.
- Handayani, Nur, dkk. 2021. "Kasus Hoax Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Linguistik Forensik" Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 17(2), 169-177.  
doi:<https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4432>.
- Hestiyana. 2019. *Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Joko Widodo sebagai Capres Petahana di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik*. Makalah Seminar Internasional Kebahasaan. Balai Bahasa Kalimantan Selatan.

- Kridalaksana, Harimurti. 2001. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] <http://kbbi.keendikbud.go.id/entri/hoaks>. Diakses September 2021.
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Levinson, Stephen C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Linawati. 2017. "Tindak Tutur Ujaran Kebencian Dalam Komentar Pembaca pada Surat Kabar *Online* Tribunnews.com." *Bahasa dan Sastra Indonesia – S-1 Universitas Negeri Yogyakarta* 6: 606-14. [www.journal.student.uny.ac.id](http://www.journal.student.uny.ac.id).
- L. Syafyaha. *Kebencian Dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna*, Kongr. Bahasa Indonesia. pp. 1–19. 2018. <http://repositori.kemdikbud.go.id>
- Mahsun. 2014. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Linguistik Forensik Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA*. Depok: Rajawali Pers.
- Murni, Sri Minda. 2009. *Kesantunan Linguistik Dalam Ranah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Disertasi. Medan. Universitas Sumatera Utara. (Online) [respository.usu.ac.id](http://respository.usu.ac.id).
- Nababan, P.J.W. 1987. *Ilmu Pragmatik*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Oktaviani, Aula. 2017. *Ungkapan Kebencian pada Tuturan Haters di Akun Instagram BasukiBTP dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. [www.eprints.ums.ac.id](http://www.eprints.ums.ac.id).
- Polri. 2015. "Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian."
- Purwo, Bambang Kaswanti. 1984. *Deiksis Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rusminto, Nurlaksana Eko. 2009. *Analisis Wacana Bahasa Indonesia (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Putri, Asdania Dwi, dkk. 2020. *Tindak Tutur Ilokusi dalam Ujaran Kebencian pada Balasan Tweet @safarinaswifty: Kajian Pragmatik*. Jurnal Ilmu Budaya. Vol. 4. No. 4 (651-661).
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Sholihatin, Endang. 2019. *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sosiowati, I Gusti Ayu Gede. 2013. "Kesantunan Bahasa Politik Dalam *Talk Show* di Metro TV." Disertasi tidak dipublikasi. Denpasar: Universitas Udayana.
- Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Kajian Linguistik Forensik: Forensics Linguistics Research Guidebook*. Bandung. Disahkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Tsesis, Alexander. 2009. *Dignity and Speech: the Regulation of Hate Speech in a Democracy*. Jurnal Loyola University Chicago. 14(1): 55-70.
- Wahyuningsih, Sri. 2021. *Reviewing Hate Speech in Indonesia Social Media Content: gender and Discourse Perspective*. Jawa Tengah: Institut Agama Islam. *ELT-Lectura: Studies and Perspective in English Language Teaching*. Vol. 8 Nomor 1, February 2021.
- Widodo, Lukman Aris. 2017. *Ujaran Kebencian Terhadap Pejabat Publik dalam Media Sosial: Kajian Pragmatik Pendekatan Gender*. PPs. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widyawati, Neni dan Asep Purwo Yudi Utomo. 2020. *Tindak Tutur Ilokusi dalam Video Podcast Deddy Corbuzier dan Najwa Shihab pada Media Sosial Youtube*. Jurnal Ilmiah Telaah, 5(2), 18-27.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Jakarta: Andi.
- Yule, George. 2006. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Terjemahan).
- Yusmah. 2010. "Penggunaan Implikatur dan Penerapan Prinsip Sopan Santun Dalam Acara *Kick Andy*: Tinjauan Pragmatik." Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.

## LAMPIRAN DATA UJARAN KEBENCIAN

### Data 1

RG : ... Dan itu memalukan karena diintip juga oleh analis-analis internasional, tentang Indonesia. Indonesia ini se-Australi, Amerika semua-semua sepakat bahwa ini memang megalomania. Dan beberapa orang masih sopan, seolah-olah 'Pak Jokowi tegur dong' yoo memang Jokowi sendiri megalomania kok. Masa megalomaniannya Luhut? Kan begitu.

### Data 2

RG : Dan memang kita mesti tega mengatakan bahwa Pak Jokowi tetap megalomania dan menginginkan kekuasaannya bertambah gitu. Dan tentu, yang sengaja dibaca atau disamarkan oleh Pak Luhut dan Menteri-menteri yang *kemaren*. Muhaemin, Golkar, Air Langga dan segala macam.

### Data 3

RG : Tapi sekali lagi, ini politik ini bersumbu pada petinggi utamanya, yaitu keinginan Pak Luhut untuk eh sorry Pak Jokowi untuk terus merayap creeping dan itu akan mengakibatkan berantakannya bangsa ini.

### Data 4

RG : Jadi kita *musti* katakan dengan sengaja bahwa memang jejak Pak Jokowi akhirnya *udah nggak* bisa dihapus. Jejak-jejak ambisiusnya itu. Dan itu memang dirapikan jalannya. Apa namanya, menuju pada satu waktu kita akan anggap bahwa di dalam diri Pak Jokowi ternyata ada mental otoriter atau bahkan totaliter. Karena kalau dia otoriter, dia *pake aja* kekerasan, kan selesai kan? Tapi ini totaliter. Totaliter ini lebih dari otoriter. Dia seolah-olah menyelundupkan ambisinya itu dengan membujuk orang segala macam, tapi di ujungnya adalah totaliterisme. Itu bahayanya di jaman demokrasi ada upaya untuk membatalkan fungsi konstitusi.

### Data 5

RG : Lain kalau Pak Jokowi punya prestasi. Jadi yang kita halangi bukan sekedar karena Jokowi ingin melompati konstitusi, tapi memang dia nggak punya prestasi. Kalau soal konstitusi itu ya

normatif udah dibilang lima tahun tapi kalau dia *nggak* punya prestasi apa dasarnya untuk zig-zag terus dan *nggak* mau terbuka mengatakan saya memang menolak.

#### Data 6

RG : Jadi ini orang-orang, Pak Habibie, SBY, orang-orang yang paham betul demokrasi. Bacaannya bagus, dan tercerahkan karena melihat peristiwa di dunia. Itu baca dengan baik oleh pak Haabibie dan Pak SBY itu. **Yang sekarang ini, Pak Jokowi *nda* punya bacaan. Dia *nggak* tahu apa itu demokrasi itu.** Jadi kalau Pak Liddle pada akhirnya menulis semacam itu artinya Pak Liddle pun menganggap bahwa Jokowi sebetulnya *nggak* paham demokrasi.

#### Data 7

RG : Bagaimanapun, Pak Liddle bisa membaca watak orang. Ini yang penting dari Pak Liddle. Dan **dia melihat ada watak kalau saya *pake* istilah bengis nanti *diomelin* orang. Jadi kebengisan itu sebetulnya diselundupkan lewat bahasa tubuh yang seolah-olah yaa orang sederhana, Pak Jokowi datang dari kalangan sipil dia sama sekali tidak punya kepentingan apa-apa.** Makin lama kita baca bahwa memang semua itu dipalsukan di dalam pencitraan kamera, di dalam *setting* agenda *setting*-nya pers yang dikuasai oleh oligarki yang pro Jokowi, dalam bahasa tubuhnya bahkan *tuh* apalagi survei. Ini baru kita tahu sebenarnya, walaupun dari awal kita *udah* duga ketika justru professor-profesor asing itu yang meneliti watak dari Pak Jokowi. Kalau kita yang *ngomong* nanti di-*bully buzzer*.

#### Data 8

RG : Dulu Presiden Jokowi bilang kita bikin mekanisasi nelayan jadi dikasih mesin dikasih subsidi apa. Iya, tapi solarnya sekarang mahal. **Jadi *nggak* ada satu paket berpikir yang utuh dan itu kita sebut selalu kegagalan Presiden Jokowi adalah maksa orang untuk kerja kerja kerja kerja, beliau sendiri *nggak* punya konsep konsep konsep. Dia berantakan.**

#### Data 9

RG : Jadi, seluruh rantai ekonomi itu akhirnya dirusak sendiri oleh kebijakan yang tadi ambisius. Padahal sebetulnya satu kalimat saja dari Ibu Sri Mulyani bilang 'saya *udah nggk* sanggup dan saya mau berhenti' selesai persolankan? Atau Pak Jokowi bilang 'IKN kami

tunda' selesai persoalan kan? Tapi dua-duanya *nggak* mungkin dilakukan karena tadi imegalomania, kan tetap bikin kalkulasi nanti bisa selesaikan di MPR, kami sogok MPR karena itu nanti periode ketiga baru kita benahi kesejahteraan rakyat.

#### Data 10

RG : Padahal rakyat tahu dari awal bahwa ini presiden ini *nggak* punya konsep. Kan semuanya ini terjadi karena *nggak* punya konsep.

#### Data 11

RG : Fiktifnya itu menghasilkan fiksi seolah-olah Pak Jokowi waktu itu pegang kartu. Kan semua segala macam kartu kan ada di katong Pak Jokowi waktu itu kan. Kartu sembako, kartu segala macam, yang dia simpan sendiri adalah kartu pradungu. Bukan prakerja.

#### Data 12

AH : Saya kira bisa kan begitu, dengan melihat dari ketinggian itu kita bisa mendapat seperti *helicopter view* tentang berbagai persoalan bangsa ini semakin lebih nyata *gitu* ya.

RG : Ya kita selalu naik lebih tinggi dari ambisi supaya kita bisa tahu bahwa ujung dari ambisi presiden adalah patahnya tiang-tiang bernegara kita. Itu bahayanya.

#### Data 13

RG : Nah, sekarang dia lihat juga Jokowi sebagai semacam Pak zero Orde Baru itu. Saya kira begitu dalilnya. Menyembunyikan sebut *aja* kekasaran politik dengan jargon-jargon yang seolah-olah berbudaya itu disembunyikan dalam tema-tema itu. Seperti nawacita seolah berbudaya revolusi mental sesuatu pendekatan yang seolah-olah mentereng.

#### Data 14

RG : Tapi sekarang Pak Bill Clinton, *sorry*, Bill Liddle (maksudnya William Liddle) mengerti apa yang sebenarnya harus diwajibkan sebagai imperatif dalam sistem demokrasi karena itu dia anggap bahwa ya *udah* ini demokrasi artinya terpinggirkan itu hari-hari ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi.

**Data 15**

RG : Nah, sekarang orang bertanya '**Jeniuskah Presiden Jokowi ketika dia memikirkan demokrasi bukan sekedar sebagai konsep karena dia *gak* ingin oposisi itu artinya demokrasi dia *gak* penuh karena tidak ada oposisi**'.

**Data 16**

RG : Tapi juga yang diperlihatkan di jalan raya di Tangerang di mana mahasiswa dibanting dan presiden coba dengan apa yang dia mau ucapkan dari kejeniusan dia tentang praktek demokrasi yang kasar seperti itu? **Itu sebetulnya yang jadi kemarahan kita hari ini. Kemarahan terhadap ketidakmampuan Presiden Jokowi untuk mengarahkan bangsa ini pada peradaban demokrasi yang otentik.**

**Data 17**

RG : Dibantingnya seorang mahasiswa itu menunjukkan bahwa **Jokowi gagal untuk menyatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab harus mendahului kekerasan kepolisian.**

**Data 18**

RG : Walaupun polisi dibekali oleh alat-alat kekerasan, tapi demokrasi tidak menghendaki penggunaan kekerasan. **Nah, itu yang disebut kejeniusan Jokowi. Jokowi buta huruf terhadap itu.**

**Data 19**

RG : Kalau dia jenius mestinya dua puluh menit berita itu beredar dia sudah tampil di publik dan kasih semacam teguran bahwa '**Saya sebagai pemimpin Indonesia tidak menghendaki ada kekerasan di jalan karena itu bertentangan dengan kejeniusan saya**'. Kalau sampai dua puluh menit dia masih diam *doang* artinya *planga-plongo* terhadap fakta di lapangan yang sekarang jadi perbincangan dunia.

**Data 20**

RG : Dia membandingkan itu dengan Jokowi. Nah, kalau begitu memang setara Presiden Jokowi dengan sistem politik yang dipilih oleh Singapore yang bahkan dari zaman Soeharto sama itu. Ya itu menegakkan stabilitas. Memang kemakmuran dijamin tapi psikologi

orang Singapore selalu merasa dibayang-bayangi terus oleh kekuasaan oleh pemerintah itu. Nah, di situ kesetaraan antara Jokowi dan Singapore. **Kalau dibilang setara secara kemakmuran, *jomplang-jomplang* betul tapi setara dalam ketidakmampuan berdemokrasi yaitu kejeniusannya. Jadi dia jenius di dalam membatalkan demokrasi itu atau meminggirkan demokrasi dalam pengertian Bill Liddle tadi.**

#### Data 21

RG : Kemarin **saya bilang presiden harus direvisi otaknya itu karena tidak paham tentang demokrasi.** Dia *nggak* mengerti bahwa demokrasi itu identik dengan oposisi. **Sekarang saya mesti ucapkan sekali lagi itu bahkan dengan cara yang lebih tegas bahwa dia bukan sekedar tidak paham, dia tidak paham konstitusi itu. Jadi sekali lagi otak presiden harus sekarang bukan sekedar direvisi tapi dikoreksi itu.** Kenapa? Karena konstitusi kita bilang waktu kita debat soal segala macam di UU *omnibus law*, 1 pasal yang sering diucapkan adalah pasal tentang hak warga negara untuk memiliki pekerjaan. Konstitusi kita kalau *nggak* salah pasal 26 apa 27 bunyinya begini “Tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan demi kemanusiaan. Jadi jelas sekali konstitusi mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan kerja. Sekarang presiden bilang negara dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara tidak bertanggung jawab terhadap penyediaan lapangan kerja itu. Itu urusan swasta. **Jadi terbukti bahwa otak presiden *musti* dikoreksi karena dia *nggak* paham konstitusi itu kan.**

#### Data 22

RG : ... Minta agar supaya negara menyediakan pekerjaan buat warga negara. Disebutkan di situ secara tegas. Dan itu terhubung dengan prinsip keadilan sosial sila kelima. **Jadi, dulu saya katakan presiden *nggak ngerti* pancasila, sekarang saya tambahkan dia *nggak ngerti* pancasila *cum* *nggak ngerti* konstitusi. Jadi lengkap bahwa beliau memang tidak paham tentang pancasila.** Sekarang saya tunggu bagaimana *buzzer* menghajar saya lagi itu.

#### Data 23

RG : Ini sama juga ini, **otak presiden, yaitu kemampuan dia untuk menafsirkan konstitusi juga tidak bekerja jadi *musti* dikoreksi. Kalau kemarin saya bilang direvisi cara berpikirnya, sekarang dikoreksi cara berpikirnya.** Kalau *nggak* nanti dia bisa di *impeach*.

#### Data 24

RG : Ini serius artinya kalau dia presiden tidak menjalankan perintah konstitusi dia diperintahkan untuk menciptakan lapangan kerja. Bahkan **dia pernah janjikan 10 juta lapangan kerja, tapi kita anggaplah kalau dia berjanji itu udah terkenal bohongnya itu. Udalah janji politik, tapi ini perintah konstitusi, yaitu menjamin hak warga negara untuk memperoleh lapangan pekerja.** Nah, jaminan itu merupakan kewajiban pemerintah. **Sekarang dia ngeles bahwa saya nggak bertanggung jawab dalam lapangan kerja.** Lalu buat apa ada pasal konstitusi itu?

#### Data 25

RG : Buat apa ada UU Ketenagakerjaan buat apa ada departemen tenaga kerja? Jadi, soal-soal semacam ini yang ingin saya perlihatkan bahwa *buzzer-buzzer* ini justru membela seseorang yang harusnya dikoreksi cara berpikirnya itu. Ini soal negara, bukan soal individu yang dianggap '*weeh nyinyir*'. Ini bukan nyinyir, ini *bener-bener* serius karena pemimpin kita tidak paham konstitusi.

HA : Nah, jadi supaya ee publik juga lebih fokus pada konten yang Anda sampaikan, **saya perjas itu yang dimaksud otak presiden itu adalah cara berpikir presiden.** Nanti daripada ributnya lebih banyak soal Anda di-*bully*.

RG : Sekali lagi itu soal cara berpikir presiden.

HA : Oke, tetapi saya berkewajiban untuk mengingatkan bahwa otak itu bukan ... cara berpikir karena ...

RG : Bukan otak biologis yaa. **Bukan otak secara biologis, tapi otak dalam pengertian kemampuan untuk menghasilkan kebijakan.**

#### Data 26

RG : **Tapi intinya adalah presiden tidak berhasil untuk member jaminan pada publik bahwa ada harapan ke depan.** Yang ada harapan konsumtif kan. *Okey* itu kita nol kan pajaknya sehingga DP-nya juga jadi nol segala macam *tuh*. Tapi itu adalah insentif untuk konsumsi *tuh*. Supaya bertumbuh ekonomi karena dianggap bahwa ekonomi tumbuh kalau konsumsi naik itu.

#### Data 27

HA : Bisa *nggak* ditafsirkan bahwa pernyataan presiden ini. Satu bahwa presiden kan berjanji menyediakan lapangan pekerjaan kalau pada periode pertama berjanji menyediakan 110 juta lapangan pekerjaan, kemudian kalau pada periode kedua ini meskipun tidak secara

eksplisit menyebutkan jumlah tapi salah satu yang jadi andalan adalah *start up* gitu ya. Akan ada 3.500 *start up* baru lahir dan menyerap tenaga kerja. Kan begitu. Nah sekarang yang kedua perhatian orang 'loh kalau begitu Pak Jokowi menyerah dong tidak mewujudkan janjinya dan juga tidak memenuhi amanat konstitusi untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya?

- RG : Bahkan dia *nggak* bahwa dia sebetulnya *udah* menyerah tuh. Karena kesadarannya itu, dia *nggak* punya kesadaran realitas itu jadi dia anggap *aja* bahwa yang dia ucapkan itu yaa itu bisa dibolak balik. Jadi ini hanya membenarkan keterangan dari akademisi luar negeri yang menganggap bahwa presiden itu adalah *man of contradiction* dan sebetulnya menjadi benar piala *award* yang diberikan oleh mahasiswa UGM bahwa beliau tidak bisa dipercaya omongannya tuh. Tapi ini kalau saya yang *ucapin* ini saya pasti di-*bully* ini, tapi saya bilang itu yang *ucapin* itu adalah analis internasional yang menganggap bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang tidak bisa dipercaya itu. *Man of contradiction*. *Nggak* ada poin yang bisa dipegang dari cara dia berpikir dan dibenarkan oleh mahasiswa itu. **Jadi saya pro pada keterangan mahasiswa bahwa beliau memang pantas dapat award itu. Kalo bisa ditambahkan lagi hari ini award baru yaitu eee presiden yang harus dikoreksi dua kali otaknya itu (hehehe)** dan berurutan. Sekali lagi ini otak dalam pengertian *public* polusi yang dia keluarkan itu yang penuh dengan kontradiksi itu.
- HA : Lebih baik saya jelaskan. Jadi, satu itu cara berpikir. Kedua *public* polusi. Karena memang dengan melihat *public* polusi presiden kan kita tahu sebenarnya cara berpikir presiden seperti apa itu ya.